



PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.

4. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
5. Klasifikasi Keamanan Arsip yang selanjutnya disebut Klasifikasi Keamanan adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Bawaslu digunakan pada:

- a. Sekretariat Jenderal Bawaslu;
- b. Sekretariat Bawaslu Provinsi; dan
- c. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### Pasal 3

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. sentralisasi untuk penetapan kebijakan kearsipan; dan
  - b. desentralisasi untuk pelaksanaan kearsipan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, dan sarana serta prasarana.

#### Pasal 4

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Bawaslu bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Bawaslu;
  - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
  - c. tersedianya informasi Bawaslu yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
  - d. terjaminnya keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
  - e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Bawaslu berfungsi untuk:
- a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip Dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar Arsip aktifnya;
  - b. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
  - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
  - d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

#### Pasal 5

- (1) Arsip dinamis Bawaslu terdiri atas:
- a. Arsip biasa;
  - b. Arsip terbatas; dan
  - c. Arsip rahasia.

- (2) Arsip biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
- (3) Arsip terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- (4) Arsip rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.

#### Pasal 6

Arsip dinamis Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. semakin tinggi tingkat kerahasiaan informasi Arsip semakin ketat tingkat pengamanan;
- b. setiap pegawai Bawaslu hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
- c. publik dapat mengakses informasi Bawaslu yang dikategorikan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Sarana dan prasarana Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Bawaslu menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa rak Arsip untuk menyimpan Arsip biasa dan terbatas, serta brankas atau lemari besi untuk Arsip rahasia;
  - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip yang disesuaikan dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif yang disesuaikan dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga, dan vital; dan
  - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.

#### Pasal 8

- (1) Prasarana berupa ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c perlu dilakukan pengamanan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan Arsip.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penyimpanan pada rak besi untuk Arsip kategori umum;
  - b. penyimpanan pada rak Arsip untuk Arsip kategori terbatas; dan
  - c. penyimpanan pada lemari besi untuk Arsip kategori rahasia.

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Bawaslu dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kearsipan dan/atau jabatan fungsional Arsiparis.

- (2) Arsiparis dan/atau pengelola Arsip aktif mempunyai tanggung jawab mengelola Arsip di pusat Arsip.
- (3) Arsiparis dalam mengelola Arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di pusat Arsip serta menetapkan hak akses Arsip.

#### Pasal 10

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Bawaslu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 11

Penyebutan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1567



LAMPIRAN  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 32 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARIP DAN AKSES  
 ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN  
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

FASILITATIF

No.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
A	KP	KEPEGAWAIAN				
1	KP.00	Formasi Pegawai				
	KP.00.00	Usulan dari Unit Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.00.01	Usulan Permintaan Formasi kepada MENPAN & RB dan Kepala BKN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.00.02	Persetujuan MENPAN & RB	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.00.03	Penetapan Formasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
2	KP.01	Pengadaan Pegawai				

	KP.01.00	Proses Penerimaan Pegawai meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumuman</li> <li>- Seleksi Administrasi</li> <li>- Pemanggilan Peserta Test</li> <li>- Pelaksanaan Ujian Tertulis</li> <li>- Keputusan Hasil Ujian</li> <li>- Wawancara</li> </ul>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.01.01	Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.01.02	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.01.03	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.01.04	Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.01.05	SK CPNS/PNS Kolektif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
3	KP.02	Pembinaan Karir Pegawai				
	KP.02.00	Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin</li> <li>- Laporan Kegiatan Pengembangan Diri</li> </ul>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi

	KP.02.01	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.02.02	SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.02.03	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.02.04	Disiplin Pegawai - Daftar Hadir - Rekapitulasi Daftar Hadir	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.02.04	Berkas Hukuman Disiplin - Ringan - Sedang - Berat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.02.05	Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
4	KP.03	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
5	KP.04	Mutasi Pegawai				
	KP.04.00	Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Mutasi Antar Unit	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.04.01	Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi

	KP.04.02	Mutasi Keluarga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Izin Pernikahan/Perceraian</li> <li>- Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian</li> <li>- Surat Nikah/Cerai <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akte Kelahiran Anak</li> <li>- Surat Keterangan Meninggal Dunia</li> </ul> </li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.04.03	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.04.04	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.04.05	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.04.06	Peninjauan Masa Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.04.07	Berkas Baperjakat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
6	KP.05	Administrasi Pegawai				
	KP.05.00	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.05.01	Cuti Besar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.05.02	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi

					Bawaslu	
	KP.05.03	Cuti Alasan Penting	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.05.04	Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.05.05	Dokumentasi Identitas Pegawai <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu</li> <li>- Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan</li> <li>- Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)</li> <li>- Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.05.06	Berkas Kepegawaian & Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
7	KP.06	Kesejahteraan Pegawai				
	KP.06.00	- Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.06.01	- Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.06.02	- Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi

	KP.06.03	- Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.06.04	- Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.06.05	- Berkas tentang Layanan Beras/Pakaian Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.06.06	- Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
8	KP.07	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
9	KP.08	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
10	KP.09	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Dudanya & PNS yang Tewas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
11	KP.10	Berkas Perorangan Pegawai:				
	KP.10.00	Berkas Perorangan ASN:	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
		a. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya				
		b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN				
		c. SK Pengangkatan CPNS				
		d. Hasil Pengujian Kesehatan				
		e. SK Pengangkatan PNS				
		f. SK Peninjauan Masa Kerja				

		g. SK Kenaikan Pangkat				
		h. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan				
		i. SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional				
		j. SK Perpindahan Wilayah Kerja				
		k. SK Perpindahan Antar Instansi				
		l. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)				
		m. Berita Acara Pemeriksaan				
		n. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS				
		o. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk				
		p. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan				
		q. SK Pemberian Uang Tunggu				
		r. SK Pembebasan dari Jabatan Organik				
		s. SK Pengalihan PNS				
		t. SK Pemberhentian sebagai PNS				
		u. SK Pemberhentian Sementara				
		v. Surat Keterangan Pernyataan Hilang				
		w. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan Hilang				
		x. SK Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara				
		y. SK Penggantian Nama				
		z. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran				
		aa. Akta Nikah/Cerai				
		bb. Akta Kelahiran				
		cc. Isian Formulir PUPNS				
		dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan				
		ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol				
		ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia</li> <li>hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan</li> <li>ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional</li> <li>jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus</li> <li>kk. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala</li> <li>ll. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri</li> <li>mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri</li> <li>nn. Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS</li> <li>oo. Ijazah/Sertifikat</li> <li>pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai</li> <li>qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk</li> <li>rr. Surat Pertimbangan Status PNS</li> <li>ss. SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS</li> <li>tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah</li> <li>uu. SK Pensiun</li> </ul>					
	KP.10.01	Berkas Perseorangan non ASN	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
12	KP.11	Berkas Perseorangan Anggota BAWASLU				
	KP.11.00	<p>BAWASLU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua dan Anggota BAWASLU</li> <li>- Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) BAWASLU</li> </ul>	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.11.01	<p>BAWASLU Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua dan Anggota BAWASLU Provinsi</li> <li>- Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) BAWASLU Provinsi</li> </ul>	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KP.11.02	BAWASLU Kabupaten/Kota	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang	Sekretariat



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua dan Anggota BAWASLU Kabupaten/Kota</li> <li>- Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) BAWASLU Kabupaten/Kota</li> </ul>			mempengaruhi kinerja Bawaslu	Bawaslu Provinsi
	KP.11.03	PANWASLU Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua dan Anggota PANWASLU Kecamatan</li> <li>- Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) PANWASLU Kecamatan</li> </ul>	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
	KP.11.04	PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota PPL</li> <li>- Anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) PPL</li> </ul>	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
	KP.11.05	PPLN (Pengawas Pemilu Luar Negeri) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota PPLN</li> <li>- Anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) PPLN</li> </ul>	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
B	KU	KEUANGAN				
1	KU.00	PELAKSANAAN ANGGARAN				
	KU.00.00	Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan Menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.00.01	Dokumen Realisasi Pendapatan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Setoran Pajak (SSP)</li> <li>b. Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC)</li> <li>c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi

	<p>d. Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja</p> <p>e. Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank</p> <p>f. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja</p> <p>g. Dokumen Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Pajak antara Pusat dan Daerah</p> <p>h. Dokumen Piutang Negara</p> <p>i. Dokumen Pengelolaan Investasi, Penyertaan Modal Negara dan sejenisnya</p> <p>j. Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara</p>				
KU.00.02	<p>Belanja</p> <p>a. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk Dokumen-Dokumen Pembayarannya:</p> <p>1) Barang pakai habis</p> <p>2) Barang inventaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang Bergerak/Barang Inventaris</li> <li>- Tanah dan Bangunan</li> </ul> <p>3) Jasa</p> <p>4) Software Komputer</p> <p>Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumuman Lelang</li> <li>- Dokumen Prakualifikasi</li> <li>- Dokumen Peninjauan Lapangan</li> <li>- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan</li> <li>- Berita Acara Pelelangan</li> <li>- Usulan Calon Pemenang</li> <li>- Penetapan Pemenang</li> <li>- Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>- Kontrak/Adendum Kontrak</li> </ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi

	<p>b. Dokumen Pembayaran Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas</li><li>- Bukti-Bukti Tagihan dari Pihak Ketiga</li><li>- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)</li><li>- Surat Perintah Membayar (SPM)</li><li>- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</li></ul> <p>c. Dokumen Tata Usaha Anggaran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Buku Kas Umum (BKU)</li><li>- Buku Kas Pembantu (BKP)</li><li>- Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran</li><li>- Rekening Koran Bank</li></ul> <p>d. Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium</p> <p>e. Kartu Gaji</p> <p>f. Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional</p> <p>g. Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah</p> <p>h. Dokumen Pembayaran Hutang Negara antara lain Tagihan dari Negara Kreditur, Bukti Transfer, Nota Debet dari Bank Indonesia dll</p> <p>i. Dokumen Akuntansi Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berita Acara Pemeriksaan Kas</li><li>- Kas/Register Penutupan Kas</li><li>- Arsip Data Komputer (ADK)</li><li>- Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN</li></ul>				
	<p>j. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</li><li>- Neraca</li><li>- Laporan Arus Kas</li><li>- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)</li><li>- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)</li><li>- Laporan Operasional (LO)</li></ul>				

		<p>k. Berita Acara Serah Terima Bendahara</p> <p>l. Surat Keputusan Perbendaharaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Penunjukan KPA</li> <li>- Surat Keputusan Penunjukan PPK</li> <li>- Surat Keputusan Penunjukan Bendahara</li> <li>- Surat Keputusan Pejabat Pengadaan</li> </ul>				
2	KU.01	BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI				
	KU.01.00	Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.01.01	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green book)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.01.02	Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , dan Dokumen Sejenisnya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.01.03	Dokumen <i>Loan Agreement</i> Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan <i>Lender</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.01.04	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.01.05	Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya:	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Reimbursement</i></li> <li>- <i>Direct Payment/Transfer Procedure</i></li> <li>- <i>Special Commitment/ L/C Opening</i></li> <li>- <i>Special Account/Imprest Fund</i></li> <li>- Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri</li> <li>- <i>Notice Of Disbursement</i></li> </ul>				
	KU.01.06	Otorisasi Penarikan Dana ( <i>Payment Advice</i> )	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja	Biro Administrasi

					Bawaslu	
	KU.01.07	Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.01.08	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure(SE)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.01.09	Staff Appraisal Report	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.01.10	Report/Laporan yang terdiri dari: - Progress Report - Monthly Report - Quarterly Report - Final Report/Completion Report	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.01.11	Laporan Hutang Negara : - Laporan Pembayaran Hutang Negara - Laporan Posisi Hutang Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.01.12	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
3	KU.02	PENGELOLA APBN/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)				
	KU.02.00	Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan: - Kuasa Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Pembuat Daftar Gaji</li> <li>- Pejabat Penandatanganan SPM</li> <li>- Bendahara Penerimaan/Pengeluaran</li> <li>- Pengelola Barang</li> <li>- termasuk berita acara serah terima jabatan</li> </ul>					
	KU.02.01	Hibah Dalam Negeri		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)</li> <li>- Nomor Registrasi Hibah Langsung</li> <li>- Ijin Pembukaan Rekening</li> <li>- Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)</li> <li>- Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL)</li> <li>- Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL)</li> </ul>					
4	KU.04	SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)					
	KU.04.00	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.04.01	Kebijakan Akuntansi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.04.02	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.04.03	Laporan Realisasi Semesteran APBN		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
5	KU.05	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA					
	KU.05.00	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan		Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja	Biro Administrasi

					Bawaslu	
	KU.05.01	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan internal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.05.02	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: - LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) - MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) - Tindak Lanjut/Tanggapan LHP Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara :	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	KU.05.03	- Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
C	PR	PERENCANAAN				
1	PR.00	Usulan Perencanaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
2	PR.01	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan	Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	PR.01.00	Bahan Masukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/master plan (RPJP)				
	PR.01.01	Bahan Masukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)				
	PR.01.02	Rencana Strategi				
	PR.01.03	Hasil Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan				
3	PR.02	Program Kerja Tahunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	PR.02.00	Usulan unit kerja beserta data pendukung				
	PR.02.01	Program Kerja Tahunan Unit Kerja				
	PR.02.02	Program Kerja Tahunan Badan Pengawas Pemilu				
4	PR.03	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki	Biro

	PR.03.00	Rencana Strategis			dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Administrasi
	PR.03.01	Rencana Kerja Tahunan				
	PR.03.02	Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama				
5	PR.03.03 PR.04	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	PR.04.00	Laporan Berkala 1. Laporan bulanan 2. Laporan triwulan 3. Laporan semesteran 4. Laporan tahunan unit kerja 5. Laporan tahunan Bawaslu				
	PR.04.01	Laporan Insidental				
6	PR.04.02 PR.05	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Evaluasi Program	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	PR.05.00	Evaluasi program unit kerja				
	PR.05.01	Evaluasi program BAWASLU dan/atau DKPP				
7	PR.06	Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	PR.06.00	Monitoring Anggaran Unit Kerja				
	PR.06.01	Monitoring Anggaran Bawaslu				
8	PR.07	Dengar Pendapat/Hearing DPR	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	PR.07.00	Bahan/Materi Pidato/Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet				
D	HK	HUKUM				
1	HK.00	Program Legislasi				



	HK.00.00	Program Legislasi Lembaga/Pemerintah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
2	HK.01	Rancangan Peraturan Bawaslu				
	HK.01.00	Rancangan Peraturan Bawaslu, termasuk naskahkajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
3	HK.02	Produk Hukum				
	HK.02.00	Produk hukum bersifat pengaturan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	HK.02.01	Produk hukum bersifat penetapan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	HK.02.02	Kajian dan Analisis Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
4	HK.03	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
5	HK.04	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi (Pidana/Perdata/PTUN dan PHPU)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
E	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
1	OT.00	ORGANISASI				
	OT.00.00	Struktur organisasi di lingkungan BAWASLU dan DKPP a. Pembentukan b. Pengubahan c. Pembubaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	OT.00.01	Berkas Reformasi Birokrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja	Biro H2PI

					Bawaslu	
	OT.00.02	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	OT.00.03	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	OT.00.04	Evaluasi Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
2	OT.01	TATA LAKSANA				
	OT.01.00	Tata Laksana (penyusunan dan penyempurnaan)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
		a. Sistem dan prosedur kerja				
		- Analisis				
		- Evaluasi				
	OT.01.01	b. Standar Pelayanan/SOP				
F	PW	PENGAWASAN				
1	PW.00	Rencana Kinerja Tahunan Pengawasan Internal				
	PW.00.00	Rencana Kerja Tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
2	PW.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal				
	PW.01.00	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
	PW.01.01	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
	PW.01.02	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja	Sekjen

		Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)			Bawaslu	
	PW.01.03	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
	PW.01.04	Laporan perkembangan, penanganan surat pengaduan masyarakat	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
	PW.01.05	Laporan pemuktakiran data tindak lanjut temuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
	PW.01.06	Laporan perkembangan Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
	PW.01.07	Laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan review keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
	PW.01.06	Good Corporate Governance (GCG)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
3	PW.02	Reviu Keuangan - Laporan dan Kertas Kerja Reviu Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
4	PW.03	Pengendalian Kinerja - Laporan Kinerja dilingkungan Bawaslu dan/atau DKPP - kertas kerja laporan hasil kinerja Bawaslu dan/atau DKPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
5	PW.04	Pelaksanaan Asistensi dan Konsultasi - Laporan dan Kertas Kerja Asistensi dan Konsultasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
6	PW.05	Pemantauan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
	PW.05.00	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program				
	PW.05.01	Tuntutan Ganti Rugi				

	PW.05.02	Pemantauan tindak laporan hasil pengawasan				
	PW.05.03	Penerapan EWS				
	PW.05.04	Pemantauan disiplin pegawai				
7	PW.06	Pengaduan masyarakat	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
8	PW.07	Pengawasan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekjen
G	AR	KEARSIPAN				
1	AR.00	Administrasi Persuratan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	AR.00.00	Buku Agenda				
	AR.00.01	Lembar Pengantar/buku ekspedisi				
	AR.00.02	Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan				
2	AR.01	Penggandaan Dokumen/Arsip Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	AR.01.00	Daftar Arsip				
	AR.01.01	Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)				
3	AR.02	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
4	AR.03	Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
5	AR.04	Penyusutan Arsip	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	AR.04.00	Pemindahan Arsip Inaktif				

	AR.04.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pindahan</li> <li>- Daftar Arsip yang dipindahkan</li> </ul> Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna				
	AR.04.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pemusnahan</li> <li>- Daftar Arsip yang dimusnahkan</li> <li>- Rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari ANRI</li> <li>- Surat Keputusan pemusnahan</li> </ul> Penyerahan arsip statis				
6	AR.05	Pembinaan Kearsipan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	AR.05.00	Apresiasi/Sosialisasi/Penyuluhan/Workshop				
	AR.05.01	Bimbingan teknis kearsipan				
H	RT	RUMAH TANGGA DAN TU				
1	RT.00	Telekomunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
2	RT.01	Perjalanan Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	RT.01.00	Dalam negeri				
	RT.01.01	Luar negeri				
3	RT.02	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan :	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	RT.02.00	Ruang dan gedung				
	RT.02.01	Kendaraan operasional				
	RT.02.02	Fasilitas dinas pejabat negara				
	RT.02.03	Fasilitas kantor lainnya				

4	RT.03 RT.03.00	Risalah/Notulen Rapat: Rapat Pimpinan/Pleno	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	RT.03.01	Rapat Internal/Rapat Rutin/Berkala (termasuk bahan-bahan rapat)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
5	RT.04	Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi Pimpinan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
6	RT.05 RT.05.00	Pengurusan Kendaraan Dinas Jabatan: Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	RT.05.01	Pemeliharaan dan perbaikan				
	RT.05.02	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan				
7	RT.06 RT.06.00	Pemeliharaan Gedung dan Taman: Pertamanan/landscaping	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	RT.06.01	Penghijauan				
	RT.06.02	Perbaikan gedung				
	RT.06.03	Kebersihan gedung dan taman				
8	RT.07 RT.07.00	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telpon, dan Komputer: Perbaikan/pemeliharaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	RT.07.01	Pemasangan				
9	RT.08 RT.08.00	Ketertiban dan Keamanan Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap kantor 1) Daftar nama satuan pengamanan 2) Daftar jaga/daftar piket	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi

		3) Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian 4) Surat ijin keluar masuk orang atau barang				
	RT.08.01	Laporan ketertiban dan keamanan 1) Kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan				
10	RT.09	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya.	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
I	PL	PERLENGKAPAN				
1	PL.00	Rencana Kebutuhan Barang				
	PL.00.00	Usulan Unit/Satuan Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	PL.00.01	Rencana Kebutuhan Kementerian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
2	PL.01	Pengadaan Barang dan Jasa - Dokumen Pelelangan/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung - Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan - Dokumen Serah Terima Pekerjaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
3	PL.02	Pemanfaatan Barang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	PL.02.00	Bantuan/Hibah				
	PL.02.01	Tukar Menukar				
	PL.02.02	Pinjaman				
	PL.02.03	Sewa				

4	PL.03	Pergudangan - Surat menyurat meliputi permintaan barang, formulir permintaan, surat perintah mengeluarkan barang (SPMB), pengantar/pengiriman barang/tanda terima barang - Berita Acara Serah Terima Barang - Buku persediaan barang/kartu stok barang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
5	PL.04	Inventaris Barang - Daftar Barang Ruangan (DBR) - Daftar Barang Lainnya (DBL) - Kartu Inventaris Barang (KIB) - Daftar Opname Fisik Barang Inventaris ( DOFBI)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
6	PL.05 PL.05.00	Pemeliharaan/Perbaikan Barang Pemeliharaan/perbaikan Barang Bergerak/Barang Inventaris Kantor (meliputi Surat Permintaan pemeliharaan/perbaikan, Surat Penawaran dari Rekanan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
7	PL.06 PL.06.00	Penghapusan Barang Penghapusan Barang Bergerak/Barang Inventaris Kantor (meliputi berkas usul penghapusan, Panitia Penghapusan s/d Berita Acara Penghapusan.	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
8	PL.07 PL.07.00 PL.07.01 PL.07.02 PL.07.03 PL.07.04	Bukti-bukti Kepemilikan Asset Sertifikat Tanah IMB Gambar/Denah bangunan/instalasi listrik, air dan gas dan <i>As Built Drawing</i> BPKB STNK	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi



J	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT				
1	HM.00	Keprotokolan:				
	HM.00.00	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	HM.00.01	Buku tamu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	HM.00.02	Agenda kegiatan Komisioner dan Sekretaris Jenderal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	HM.00.03	Kunjungan dalam negeri 1) Kunjungan dinas Komisioner  2) Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	HM.00.04	Kunjungan luar negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	HM.00.05	Daftar nama/alamat rumah/pejabat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	HM.00.06	Keamanan dan Ketertiban untuk Pimpinan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
2	HM.01	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media :	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja	Biro H2PI

		Kertas/foto/video/rekaman suara/multi media			Bawaslu	
	HM.01.00	Dokumentasi/liputan kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu				
	HM.01.01	Dokumentasi/liputan kegiatan lainnya				
3	HM.02	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan:	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	HM.02.00	Kliping koran				
	HM.02.01	Brosur/leaflet/poster/plakat				
	HM.02.02	Pengumuman/pemberitaan				
4	HM.03	Hubungan Antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi:	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
	HM.03.00	Hubungan antar lembaga pemerintah				
	HM.03.01	Hubungan dengan organisasi sosial/LSM				
	HM.03.02	Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)				
	HM.03.03	Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)				
	HM.03.04	Hubungan dengan media massa 1) Siaran pers/konferensi pers/press release 2) Kunjungan wartawan/peliputan 3) Wawancara				
5	HM.04	Liputan Rapat Dengar Pendapat/Hearing DPR	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI

6	HM.05	Publikasi Melalui Media Cetak (buku, buletin, jurnal, dll) maupun Elektronik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
7	HM.06	Pameran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
8	HM.07	Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
9	HM.08	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf dari Pimpinan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro H2PI
K	TI	TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI				
1	TI.00	Rencana Strategis/Master Plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	TI.01	Dokumen Arsitektur:	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	TI.01.00	Sistem Informasi				
	TI.01.01	Sistem Aplikasi				
	TI.01.02	Infrastruktur				
2	TI.02	Dokumentasi Implementasi:	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
	TI.02.00	Sistem Informasi				
	TI.02.01	Sistem Aplikasi				
	TI.02.02	Infrastruktur				
3	TI.03	Perekaman dan Pemutakhiran Data: - Formulir Isian - Daftar Petugas Perekaman	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Jadwal Pelaksanaan</li><li>- Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data</li></ul>				
4	TI.04	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data: <ul style="list-style-type: none"><li>- Perencanaan Migrasi</li><li>- Pelaksanaan Migrasi</li><li>- Berita Acara Kegiatan Migrasi</li><li>- Daftar sistem aplikasi dan data yang imigrasi</li><li>- Laporan hasil migrasi</li></ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
5	TI.05	Dokumen Hosting: <ul style="list-style-type: none"><li>- Formulir permintaan hosting</li><li>- Laporan hasil uji kelayakan</li><li>- Laporan pelaksanaan hosting</li></ul>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi
6	TI.06	Layanan Back-up Data Digital	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Administrasi

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

ABHAN